



## Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mariska Ardilla Faza

Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 40141, Indonesia.

### Abstract

*Nowadays, Halal Tourism has become a popular and interesting term for several regions, including Indonesia, which is predominantly Muslim. Its role can have a positive impact on economic development, making halal tourism needs to be developed. In Indonesia, the Province of West Nusa Tenggara (NTB) is the most potential region in developing this field, based on awards related to Halal Tourism which are ever achieved. This study aims to review the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the Halal Tourism of NTB Province, through the SWOT Analysis Method. The results show that strong local government encouragement, the availability of various kinds of destinations and praying facilities, also the closeness of NTB's community orientation to Islam are the basis of its strengths. The weaknesses are the lack of business related to tourism that is halal certified and the provision of services for tourists has still not done optimally yet. While the opportunities are relatively easy to access for tourists to visit NTB and the support of the central government. Then for the threats, there are "competitor" countries that also develop Halal Tourism, the possibility of getting in incompatible cultural and negative attitudes related to the environmental sustainability of tourists, as well as natural disaster. By preparing and applying strategies based on the results of the analysis, NTB is expected to be better in developing Halal Tourism in order to advance the economic condition and can be a benchmark for other provinces in advancing this field.*

*Keywords— SWOT Analysis; The Halal Tourism; West Nusa Tenggara.*

### Abstrak

Dewasa ini, Pariwisata Halal menjadi suatu istilah populer dan menarik bagi beberapa wilayah, termasuk Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim. Perannya yang dapat berdampak positif pada pembangunan ekonomi, membuat pariwisata halal perlu dikembangkan. Di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah daerah yang paling berpotensi dalam mengembangkan bidang ini, berdasarkan penghargaan-penghargaan terkait Wisata Halal yang pernah diraihinya. Penelitian ini bertujuan meninjau kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman Pariwisata Halal Provinsi NTB, melalui Metode Analisis SWOT. Hasil menunjukkan, kuatnya dorongan pemerintah daerah, ketersediaan banyak destinasi wisata dan fasilitas ibadah, serta eratnya orientasi masyarakat NTB dengan Islam menjadi dasar kekuatannya. Kelemahannya yaitu kurangnya jumlah kegiatan usaha yang bersertifikasi halal dan masih belum optimalnya penyediaan layanan bagi wisatawan. Sedangkan peluangnya adalah akses yang relatif mudah bagi turis untuk berkunjung ke NTB dan adanya dukungan dari pemerintah pusat. Lalu ancamannya adalah negara-negara "pesaing" yang juga mengembangkan Pariwisata Halal, adanya kemungkinan masuknya budaya yang tak sejalan dan sikap negatif terkait kelestarian lingkungan dari wisatawan, dan bencana alam. Dengan menyusun dan menerapkan strategi berdasarkan hasil analisis, diharapkan NTB semakin baik dalam mengembangkan Pariwisata Halalnya demi memajukan kondisi perekonomian, serta bisa menjadi benchmark bagi provinsi lain dalam memajukan bidang ini.

Kata kunci— Analisis SWOT; Pariwisata Halal; Nusa Tenggara Barat.

## I. PENDAHULUAN

Istilah halal tentunya sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, mengingat Islam menjadi agama dominan di negara tersebut, di mana menurut data hasil sensus penduduk tahun 2010, sebanyak 87,18% penduduk Indonesia beragama Islam (Badan Pusat Statistik (BPS), 2010). Secara definisi, Departemen Pendidikan Nasional (2008) menyebutkan bahwa halal di antaranya diartikan sebagai "diizinkan" (tidak dilarang oleh syarak) dan sah. Secara umum, kata "halal" biasa dipergunakan untuk makanan dan minuman. Namun sebenarnya, dalam agama Islam sendiri, sesuatu yang memiliki ketentuan "diizinkan" atau tidak, tidak terbatas

### Article info

Received (23<sup>rd</sup> January, 2019)

Revised (22<sup>th</sup> February, 2019)

Accepted (5<sup>th</sup> April, 2019)

Corresponding\_author: [mariskaardillafa@gmail.com](mailto:mariskaardillafa@gmail.com)

pada makanan dan minuman. Dewasa ini, penggunaan istilah tersebut telah disandingkan pada berbagai hal, termasuk sektor pariwisata. Hal ini menjadi sesuatu yang begitu penting mengingat kesadaran mengenai konsep halal kini naik ke permukaan, dan untuk merespon kondisi ini, perusahaan-perusahaan mempersiapkan diri untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen, baik produk barang maupun jasa (Thomson Reuters, 2018). Dengan kata lain, perusahaan berperan dalam sisi penawaran yang "bereaksi" atas "aksi" konsumen sebagai bagian dari sisi permintaannya.

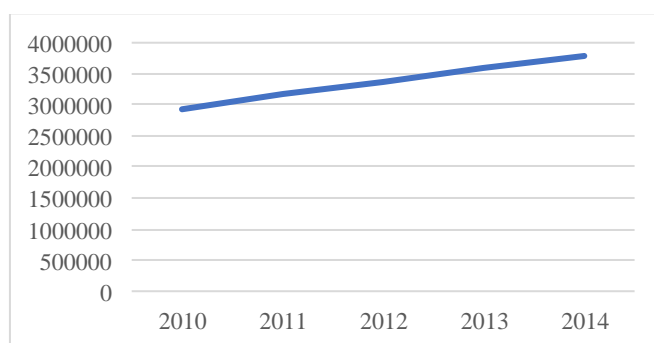
Thomson Reuters (2018) dalam laporannya mengenai perekonomian Islam dunia periode 2017/2018 menyebutkan, terdapat enam sektor ekonomi global yang dilekatkan/berkaitan dengan istilah halal. Sektor-sektor tersebut adalah makanan (*halal food*), keuangan (*islamic finance*), pariwisata (*halal travel*), mode/pakaian (*modest fashion*), media (*halal media & recreation*), dan farmasi (*halal pharmaceuticals & cosmetics*). Berdasarkan *The Global Islamic Economy Indicator*, pada sepuluh negara urutan teratas, Indonesia tidak masuk pada kategori manapun kecuali pada peringkat ke-10 dari sepuluh negara untuk kategori *Islamic finance*, kedelapan untuk *halal pharmaceuticals & cosmetics*, keempat untuk urutan *halal travel* (Thomson Reuters, 2018), yang ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1. Sepuluh Negara dengan Peringkat Teratas berdasarkan Sektor Halal

	HALAL FOOD	ISLAMIC FINANCE	HALAL TRAVEL	MODEST FASHION	HALAL MEDIA & RECREATION	HALAL PHARMACEUTICALS & COSMETICS
1	Malaysia	Malaysia	Malaysia	UAE	UAE	UAE
2	UAE	Bahrain	UAE	Turkey	Singapore	Singapore
3	Brazil	UAE	Turkey	Italy	Qatar	Malaysia
4	Australia	Saudi Arabia	Indonesia	Singapore	Malaysia	Egypt
5	Pakistan	Oman	Thailand	France	United Kingdom	Pakistan
6	Oman	Kuwait	Saudi Arabia	China	Lebanon	Jordan
7	Brunei	Pakistan	Tunisia	Malaysia	Germany	Saudi Arabia
8	Singapore	Qatar	Maldives	India	Oman	Indonesia
9	Sudan	Iran	Qatar	Sri Lanka	Bahrain	France
10	Saudi Arabia	Indonesia	Jordan	Morocco	France	Oman

Sumber: Thomson Reuters (2018).

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa dari keseluruhan sektor, Indonesia cukup unggul di sektor pariwisata –setelah Malaysia, Uni Emirates Arab (UEA), dan Turki– dibandingkan pada sektor lainnya. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Jaelani (2017a), juga menyatakan bahwa pariwisata halal di Indonesia mempunyai prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata nasional. Sebagai tambahan, prospek ekonomi yang baik dapat pula diperlihatkan oleh tren PDRB NTB yang meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. PDRB NTB dari Sektor Pariwisata (Sumber: Badan Pusat Statistik, n.d.)

Mengacu pada hal ini, penelitian ini dimaksudkan untuk mengerucutkan analisis pada pariwisata halal yang dianggap paling berpotensi di antara kategori halal lainnya bagi Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pembahasan pada salah satu provinsi yang diupayakan menjadi contoh bagi provinsi lainnya untuk mengembangkan sektor pariwisata halalnya.

Kemenpar sudah menetapkan tiga provinsi yang dikembangkan untuk wisata halal, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, dan Naggroe Aceh Darussalam (NAD) (Tribunnews.com, 2016). Terkait hal ini, Provinsi NAD telah diteliti kesiapannya dalam menyelenggarakan wisata syariah oleh Kementerian Pariwisata (2015). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa NAD sudah siap dilihat dari aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan. Di tahun 2015, NTB juga menunjukkan prestasinya, sebagai wakil dari Indonesia dengan memenangkan *World Halal Travel Awards 2015*, pada kategori *the World's Best Honeymoon Halal*

*Destination and World's Best Halal Tourism Destination* (Hukmi, 2015). Kemudian dilansir dari *website Ministry of Tourism - Republic of Indonesia* (2018), pada tahun 2016, NTB meraih tiga penghargaan, yakni: (1) *World's Best Halal Beach Resort, Novotel Lombok Resort & Villas*, Lombok, NTB; (2) *World's Best Halal Tourism Website* [www.wonderfullomboksumbawa.com](http://www.wonderfullomboksumbawa.com), Indonesia. (3) *World's Best Halal Honeymoon Destination – Sembalun Village Region, Lomok, NTB, Indonesia*.

Nursastri (2014) mengatakan bahwa NTB, khususnya Lombok, berada di baris terdepan untuk kategori wisata syariah. Menurutnya, sebagaimana dikenal dengan julukan “Pulau Seribu Masjid”, Lombok memiliki masyarakat yang kehidupan sehari-harinya beraktivitas sekaligus mengisi komponen kegiatan untuk wisata syariah itu sendiri, misalnya turis yang menginap di pondok pesantren dan mengikuti kegiatan harian para santri. Di samping itu, wisata alam yang kaya di NTB, seperti Gili Trawangan, Pulau Moyo, dan Gunung Rinjani, juga menjadi bagian dari wisata syariah, yang dijadikan media untuk mengagumi karya Sang Pencipta (Nursastri, 2014).

Berdasarkan data tersebut, Provinsi NTB adalah provinsi yang paling menonjol dalam hal pengembangan sektor pariwisata halal. Mengetahui hal tersebut, pengkajian lebih dalam mengenai wisata halal dirasa perlu demi mengembangkan Provinsi NTB dari sektor pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk meninjau kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai upaya pengembangan Pariwisata Halal di NTB, yang juga bisa dijadikan pandangan bagi provinsi lain untuk mengembangkan hal yang sama.

## II. PARIWISATA HALAL

Istilah wisata religi sudah banyak dikenal oleh banyak orang, yang dicontohkan dengan wisata ziarah atau keagamaan. Namun Jaelani (2017a) menyebutkan bahwa istilah ini kian berkembang sejalan dengan berkembangnya ekonomi Islam di dunia, yang kemudian istilah berganti menjadi wisata syariah, dan beberapa tahun terakhir berubah ke wisata halal. Kemudian ia menjelaskan bahwa wisata halal tidak tertutup hanya pada keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, namun juga meliputi tersedianya pendukung, misal restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat sholat. Namun sampai saat ini, terminologi wisata syariah dan wisata halal, nampaknya masih digunakan dengan makna yang serupa. Seperti misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan kata “Syariah”, sementara Gubernur NTB dalam peraturannya menggunakan istilah “Halal”.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2016) dalam fatwanya, pariwisata syariah adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Pariwisata Halal didefinisikan sebagai kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah (Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016). Selanjutnya, pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 tahun 2015, wisata halal didefinisikan sebagai kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah (Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, 2015). Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa baik penggunaan istilah syariah maupun halal, keduanya memiliki konsep yang sama untuk hal ini.

Topik terkait hal ini telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Sanad, Kassem, & Scott (2010) melakukan penelitian mengenai pariwisata dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Hasilnya adalah pariwisata merupakan hak asasi manusia di bawah hukum Islam dan bahwa orang-orang Muslim yang melarang pariwisata tidak mengetahui sifat asli syariah. Kemudian, esensi dari pariwisata halal ini sendiri bergantung pada tujuannya. Bogan dan Sarri sik (2018) menjelaskan bahwa adanya preferensi individu untuk bepergian dengan motivasi mendapatkan ridho Allah memunculkan jenis pariwisata yang lebih khusus, yakni pariwisata halal. Motivasi bepergian tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan beberapa hal, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tajzadeh (2013) dalam Jaelani (2017b) melakukan *review* terhadap Al-Qur'an mengenai hal ini yang hasilnya dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Ayat-Ayat Al-Qur'an terkait Kegiatan dalam Perjalanan

Surat	Ayat	Isi	
3	Ali-Imran	137	Mempelajari kehidupan manusia dari masa lalunya
30	Ar-Rum	42	Mempelajari takdir manusia dari masa lalunya
16	An-Nahl	36	Mempelajari bagaimana Nabi diangkat
6	Al-An'am	11	Mempelajari kehidupan para pelaku kejahatan
34	Saba	11	Berpikir tentang penciptaan, berpikir tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang

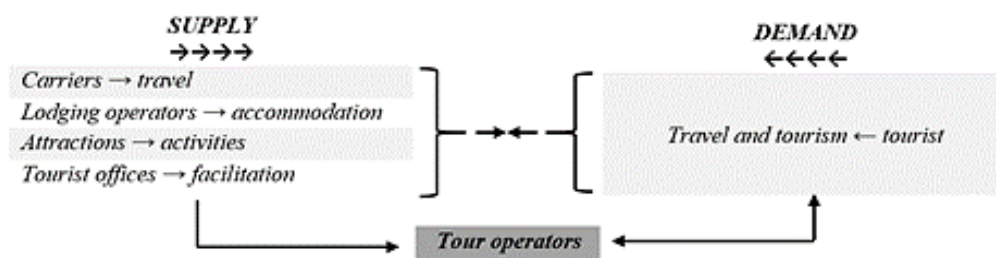
Surat	Ayat	Isi
		melakukan kesalahan, mengunjungi kota-kota yang aman dan makmur
Keseluruhan		Al-Quran menyeru manusia untuk bepergian dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada orang-orang kafir dan orang-orang yang mengingkari tanda-tanda Ilahi; secara umum, dapat dikatakan bahwa bepergian membantu orang mencapai penjelasan teoretis dan praktis serta untuk menegaskan kembali Iman mereka di hari kebangkitan.

Sumber: Tajzadeh (2013) dalam Jaelani (2017b), diolah.

Di samping niat, hal lain yang menjadi karakteristik wisata halal disampaikan oleh Sanad, Kassem, & Scott (2010), yaitu jenis wisata religi yang merepresentasikan aktivitas yang diizinkan dalam ajaran Islam baik itu dari sisi perilaku, pakaian, dan makanan. Untuk mengetahui apa saja persisnya ukuran suatu pariwisata dikatakan halal atau tidak, diperlukan indikator yang menjadi acuannya. Jaelani (2017b) menyebutkan kriteria umum pariwisata halal yaitu berorientasi pada kebaikan bersama; berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan; menghindari penyembahan berhala dan takhayul; bebas dari dosa; menjaga keamanan dan kenyamanan; melindungi lingkungan; dan menghormati nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Indikator lain dikatakan Gabdrakhmanov *et al*, (2016), yaitu wisata halal mensyaratkan adanya makanan, minuman, dan hiburan halal; pengumuman waktu beribadah; ruang ibadah; kolam terpisah (berdasarkan gender); dan tidak ada musik. Lebih spesifik mengenai makanan, M. Battour *et al* (2017), M. M. Battour *et al* (2010), Dugan (1994), Stephenson (2014) dalam Battour *et al* (2018) menyampaikan bahwa makanan halal menurut syariah adalah selain dari hal-hal berikut: (1). babi, (2). binatang yang dimatikan tanpa disembelih, (3). hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, (4). darah, (5). alkohol, (6). binatang predator, dan (7). burung pemangsa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kehalalan suatu produk pariwisata halal tidak terbatas pada makanan. Indikator lainnya adalah akomodasi, misalnya hotel. Bogan & Saru sik (2018) membagi halal hotel ke dalam tiga kategori, yaitu: (1). *Dry hotels* atau hotel yang hanya melarang ketersediaan alkohol; (2). *Partially halal hotels* atau hotel yang menyediakan makanan halal, tempat beribadah, Al-Qur'an dan sajadah di ruang (tidur), memisahkan pelayanan untuk perempuan dan laki-laki, (3). *Halal hotels* atau hotel yang mengikuti aturan syariah untuk semua fasilitas, mulai dari desain sampai pada keuangan hotel, sebagai tambahan untuk hal-hal lain yang diterapkan pada konsep halal di dua jenis halal hotel sebelumnya. Dengan demikian, pariwisata halal ini pada dasarnya terselenggara dengan menerapkan nilai-nilai Islam, di mana para pelakunya mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Indonesia sendiri memiliki peraturan yang memuat indikator mengenai pariwisata syariah itu sendiri. Dalam penelitian ini, aturan yang diacu adalah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pergub NTB) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Perda NTB) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Aturan-aturan ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang akan disajikan pada bagian pembahasan. Secara keseluruhan, indikator-indikator yang tertera pada Pergub NTB dan Perda NTB dalam hal ini relatif sama. Keduanya memuat indikator pariwisata halal berdasarkan empat kegiatan usaha, yaitu akomodasi; penyedia makanan dan minuman; spa, sauna, dan griya pijat; serta biro perjalanan wisata. Sedangkan dalam fatwa MUI, peraturan tidak hanya mencakup sisi *supply* –kategori yang sama dengan peraturan lainnya, namun ditambah dengan destinasi wisata, dan pemandu wisata syariah–, melainkan juga sisi *demand* atau wisatawannya.

Berkenaan dengan NTB sebagai provinsi yang menyediakan destinasi pariwisata, khususnya pariwisata halal, maka NTB berperan dalam sisi penawaran, yang perlu mempersiapkan diri dengan adanya perjalanan, akomodasi, daya tarik, dan fasilitas. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pariwisata yang bersifat konvensional, melainkan juga untuk pariwisata halal. Dengan begitu, hal tersebut dimungkinkan untuk menarik wisatawan yang merupakan bagian dari sisi *demand*. Kondisi ini dapat ditunjukkan oleh Gambar 2.

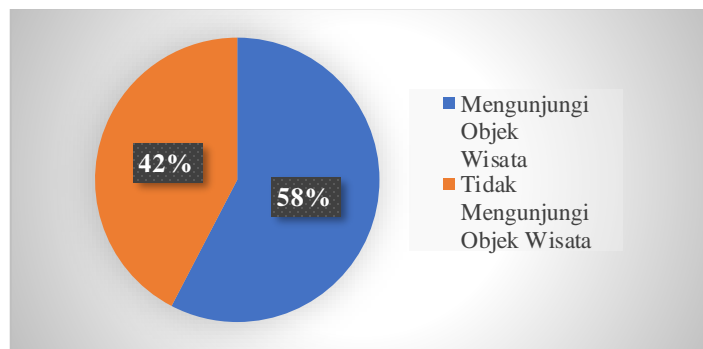


Gambar 2. Interaksi Sisi Penawaran dan Sisi Permintaan Sektor Pariwisata (Sumber: Bull, 1995)

III. SEKILAS TENTANG PARIWISATA

Provinsi NTB sendiri terbagi atas delapan kabupaten dan dua kota. Kedelapan kabupaten tersebut adalah Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Sedangkan kotanya adalah Bima dan Mataram. Setiap kawasan tersebut memiliki tempat wisata yang menjadi daya tarik Provinsi NTB, di antaranya Gunung Tambora di Kabupaten Bima dan Dompu; Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, dan Narmada Park di Lombok Barat; Mandalika di Lombok Tengah; *Pink Beach* di Lombok Timur; *Gili Islands* di Lombok Utara; Air Terjun Mata Jitu di Sumbawa; Pulau Kenawa di Sumbawa Barat; Wadu Ntanda Rahi di Kota Bima; serta Taman Mayura dan *Islamic Center* di Kota Mataram. Daya tarik yang khas di NTB ini dipadukan dengan ketersediaan akomodasi dan fasilitasnya, menjadikan provinsi ini layak untuk dikembangkan sektor pariwisatanya.

Memukaunya NTB, menarik penduduk untuk melakukan perjalanan ke provinsi ini. Kegiatan yang dilakukan di sana didominasi dengan tujuan wisata, sebagaimana diperlihatkan oleh Gambar 3. Secara lebih spesifik, durasi penduduk dalam melakukan aktivitas wisata ditunjukkan oleh Tabel 2.



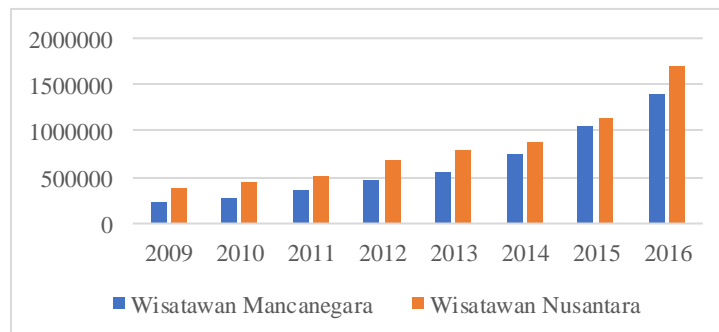
Gambar 3. Distribusi Penduduk yang Melakukan Perjalanan di NTB menurut Aktivitas yang Dilakukan selama Januari – Juni 2016 (Sumber: Badan Pusat Statistik & Kementerian Pariwisata, 2016)

Tabel 3. Rata-rata Lama Berpergian Penduduk yang Melakukan Perjalanan di NTB berdasarkan Aktivitas yang Dilakukan Selama Januari-Juni 2016

	Aktivitas	
	Mengunjungi Objek Wisata	Tidak Mengunjungi Objek Wisata
Jumlah hari	5.82	1.05

Sumber: Badan Pusat Statistik & Kementerian Pariwisata (2016)

Kunjungan wisatawan ke NTB kian tahun kian meningkat, baik itu yang berasal dari dalam maupun luar negeri, seperti yang terlihat pada Gambar 4. Hal ini mengindikasikan bahwa pesona wisata NTB semakin dikenal oleh masyarakat dari luar NTB.



Gambar 4. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara NTB Tahun 2009-2016 (Sumber: Badan Pusat Statistik, n.d.)

#### IV. METODE

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis data terkait sektor pariwisata, baik kuantitatif maupun kualitatif, seperti PDRB Provinsi NTB dari sektor pariwisata; jumlah wisatawan, nusantara maupun mancanegara; distribusi penduduk yang melakukan perjalanan di NTB berdasarkan aktivitasnya; rata-rata lama bepergian penduduk yang melakukan perjalanan di NTB berdasarkan aktivitasnya; rute penerbangan ke dan dari NTB; tempat ibadah yang tersedia; kondisi sanitasi; serta data lain yang terkait dengan objek wisata dan fasilitas pendukung objek wisata di NTB. Keseluruhan data tersebut diperoleh dan dikumpulkan dengan mengunduh dari berbagai sumber, yaitu Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama, FlightRadar24, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kota Bima, serta sumber-sumber pendukung lain seperti laporan terbitan internasional dan berita *online*. Semua data diolah dan disajikan sebagai bahan Analisis SWOT.

Para peneliti dari manajemen strategi menyetujui bahwa Analisis SWOT –Analisis kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), kesempatan (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*)– menyediakan fondasi untuk realisasi keselarasan variabel atau isu dalam organisasi (Helms & Nixon, 2010). Mereka mengungkapkan bahwa melalui identifikasi isu internal dan eksternal, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan dalam empat kadaran di Analisis SWOT, pembuat rencana akan lebih baik dalam memahami bagaimana kekuatan bisa mengarahkan pada realisasi kesempatan serta memahami bagaimana kelemahan bisa memperlambat kemajuan atau memperbesar ancaman bagi suatu organisasi.

Penggunaan analisis SWOT bisa diterapkan untuk berbagai lingkup, dimulai dari individu, perusahaan, sampai pada daerah atau bahkan negara. Dalam lingkup individu, setiap orang bisa menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui sisi kelemahan dan kelebihan baik dari internal maupun eksternal diri dalam mencapai cita-cita. Pada lingkup perusahaan, Helms & Nixon, (2010) menyatakan bahwa Sorehensen (2004) pernah melakukan analisis terkait keperluan pendekatan strategis dalam proses pembelajaran Perusahaan Kirby. Sedangkan untuk lingkup yang lebih besar dari itu, katakanlah pada negara, Turki mengaplikasikan analisis SWOT sebagai bagian dari rencana aksinya untuk mewujudkan *e-government*, menurut Kahraman dalam Helms & Nixon (2010). Berdasarkan informasi mengenai fleksibilitas dan kegunaan analisis SWOT tersebut, penelitian ini juga berupaya untuk menggunakan analisis SWOT dalam lingkup provinsi, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tengah mengembangkan Sektor pariwisatanya, melalui Pariwisata Halal.

#### V. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. *Strengths*

Sebagai Provinsi yang telah mendapatkan beberapa penghargaan bertaraf Internasional dalam bidang Pariwisata Halal, Provinsi NTB memiliki beberapa keunggulan terkait hal tersebut. Menurut Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (2016), terdapat setidaknya tiga alasan Lombok –yang merupakan bagian dari NTB– layak jadi destinasi wisata halal. Hal ini disampaikan dalam masa pemerintahan Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Lc., M.A., yang menjadi awal digaungkannya NTB sebagai provinsi berpotensi wisata halal. Ketiga alasan tersebut adalah (1) keselarasan visi dan misi Pemerintah Daerah dengan pengembangan wisata halal, (2) kentalnya jati diri masyarakat Lombok dengan pengaplikasian nilai-nilai agama Islam, dan (3) sejalanannya profil kepala daerah di Provinsi NTB dengan pengembangan pengembangan pariwisata halal. Visi dari Gubernur Provinsi NTB kala itu berbunyi “Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing, dan Sejahtera” (Pemerintah Provinsi NTB). Dari kalimat tersebut, terkait hal ini disoroti kata “beriman”, yang dianggap sesuai dengan pengembangan wisata halal. Dalam *website* Pemerintah Provinsi NTB (n.d.), dijelaskan makna dari kata “beriman” ini, yaitu “masyarakat yang agamis, atau religius, yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, berahlak mulia dan saling menghargai satu sama lain”. Salah satu hal yang mencerminkan dijalankannya visi tersebut adalah dari upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB dalam memperjuangkan terselenggaranya wisata halal. Hal ini secara tidak langsung “memaksa” sejumlah penyedia barang maupun jasa di NTB mempersiapkan produknya dengan memerhatikan syariat. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke NTB pun harus dibuat nyaman dengan ketersediaan berbagai fasilitas ibadah.

Disebutkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (2016), bahwa masyarakat Lombok memiliki kultur yang kental dengan pengaplikasian agama Islam, sehingga semangat beragama masyarakat Lombok tinggi dan hal tersebut dapat mendorong implementasi program-program yang ditetapkan pemerintah. Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian Permadi, *et al* (2018), yang menyatakan bahwa terhadap rencana penerapan wisata halal di NTB, masyarakat NTB memiliki persepsi yang baik dan sikap yang positif dan ini harus direspon kembali oleh pemerintah dengan kebijakan yang dapat mempertahankan sikap dan persepsi masyarakatnya. Di tambah lagi, Nursastri (2014) pun menyebutkan bahwa “Pulau Seribu Masjid” (Lombok) yang juga bagian dari

NTB memiliki masyarakat yang kehidupan sehari-harinya seolah melibatkan diri pada aktivitas wisata syariah, contohnya turis yang menginap di pondok pesantren dan menyertai kegiatan sehari-hari para santri.

Berikutnya, latar belakang Gubernur NTB periode 2013-2018, yang akrab disebut TGB, sangat selaras dengan program yang berupaya untuk mengembangkan wisata halal. Menurut Kirom (2017), beliau adalah seorang lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, dengan jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an jenjang S1 sampai dengan S3. Beliau berhasil mendapatkan predikat yang setara dengan *summa cumlaude* ketika meraih gelar doktornya. Hal ini menjadi bukti yang relatif dapat mempermudah terselenggaranya program wisata halal karena sebagai pemimpin, beliau dianggap mumpuni mengarahkan penerapan ilmu yang telah dipelajarinya sampai jenjang S3.

Tidak berhenti di situ, gubernur terpilih pada periode berikutnya, Dr. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc, memiliki beberapa misi yang salah satunya mengarah pada pengembangan pariwisata, yakni "Mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sektor pariwisata, industri sektor unggulan serta kawasan strategis". Di samping itu, ia juga mencanangkan misi terkait penerapan nilai agama, yaitu "Percepatan perwujudan masyarakat madani yang "beriman" dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan gender yang proporsional". Seperti halnya TGB, terdapat kata "beriman" dalam tujuan pencapaiannya. Hal tersebut disampaikan oleh Bidang IKP Dinas KOMINFOTIK NTB (2018) dalam *website* resmi Pemerintah Provinsi NTB. Kemudian sumber yang sama menyampaikan beberapa program gubernur baru NTB, yakni dalam mendukung pengembangan wisata NTB, diupayakan menambah penerbangan domestik dan internasional serta memperbanyak kegiatan yang cakupannya internasional di NTB; membangun desa wisata potensial (untuk upaya di bidang pembangunan pedesaan dan lingkungan); serta di Bidang Pembangunan Sosial Kebudayaan, pusat peradaban *Islamic Center* diupayakan untuk lebih dimantapkan dan memberikan dorongan bagi pesantren untuk pusat gerakan perubahan sosial dan kultural. Beberapa rencana yang disusun tersebut menjadi bagian dari kekuatan NTB di bidang ini.

Mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia (APII) NTB merintis konsep program pembentukan 100 desa wisata halal di Lombok dan Sumbawa (Nursyamsi, 2018). Menurutnya, hal ini dilakukan melalui beberapa tahapan selama lima tahun kepemimpinan Gubernur NTB saat ini (2018-2023) dan sudah mulai diwujudkan dengan memformasikan tim asesmen yang akan memetakan desa-desa potensial untuk wisata halal, ujar Fauzan, Ketua Umum APII. Beberapa rencana yang ia sampaikan adalah dengan mencoba berkoordinasi dengan penduduk untuk menyediakan *homestay* milik masyarakat di desa wisata untuk tempat wisatawan menginap, serta mempersiapkan aktivitas-aktivitas sisi lainnya seperti kuliner dan aktivitas ekonomi kreatif seperti menenun.

Di luar perencanaan yang dilakukan untuk membangun NTB sebagai wilayah wisata halal, seperti yang telah disebutkan pada subjudul III bahwa NTB memiliki banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, misalnya untuk wisata alam, terdapat pantai, gunung, air terjun, dan pulau. Salah satu wisata buatanya adalah taman. Lebih spesifik untuk wisata religi khususnya wisata bernuansa Islam, destinasi yang paling dikenal di NTB adalah *Islamic Center* NTB. Di dalamnya terdapat Masjid Raya Hubbul Wathan, disertai dengan menara yang digunakan untuk melihat kota Mataram dari atas, dengan ketinggian 99 m (mengikuti jumlah *asma'ul husna*) dan 114 m untuk tinggi atap bangunannya (mengikuti jumlah surat yang ada dalam Al-Qur'an (Khafid, 2018). Dari sumber yang sama disebutkan bahwa selain bisa melaksanakan ibadah sholat, di sana terdapat *tourism zone* (pusat informasi wisata), foto-foto masjid di NTB, pusat kajian Islam, dan kompleks pendidikan. Pada waktu tertentu, seperti di bulan puasa, lebih banyak aktivitas yang diselenggarakan di sana, misalnya shalat tarawih berjamaah dengan imam besar dari tiga negara, kajian dengan pendakwah populer, bazar buku Islam, dan pameran travel umroh yang semuanya dikemas dalam Pesona Kasanah Ramadhan (PKR) (Nusyamsyi, 2018). Oleh karena itu, keberadaan *Islamic Center* ini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat maupun turis untuk melaksanakan ibadah maupun berwisata religi. Dalam memenuhi kebutuhan wisatawan muslim (ataupun non-muslim yang juga tertarik), terdapat paket wisata halal yang disediakan oleh *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (Asita) NTB di mana di dalam paketnya terdapat wisata budaya ke Desa Sade, wisata religi ke *Islamic Center* dan Masjid kuno Karang Bayan, dan wisata alam ke beberapa pulau di NTB (Ridwan, 2016). Dengan demikian, Provinsi NTB dapat dikatakan sebagai destinasi yang lengkap dan tepat bagi siapapun yang ingin menikmati beragam jenis wisata dalam satu tempat.

Selanjutnya, komponen lain yang juga perlu diperhatikan dalam wisata halal adalah ketersediaan tempat ibadah. Data mengenai keberadaan masjid dan mushalla dirangkum dalam tabel 4.

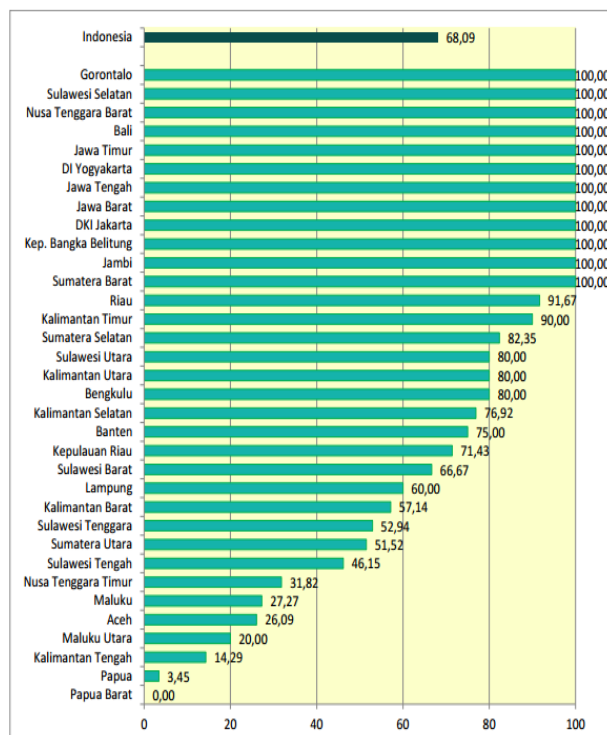
Tabel 4. Jumlah Masjid dan Mushalla di Provinsi NTB

	Jumlah Masjid	Jumlah Mushalla
Kab. Bima	42	32
Kab. Dompu	103	8
Kab. Lombok Barat	348	161
Kab. Lombok Tengah	1201	439
Kab. Lombok Timur	1173	2199
Kab. Lombok Utara	163	77
Kab. Sumbawa	516	226
Kab. Sumbawa Barat	172	22
Kota Bima	118	119
Kota Mataram	221	3
	4057	3286

Sumber: Kementerian Agama RI (2014) dan Pemerintah Kota Bima (2017)

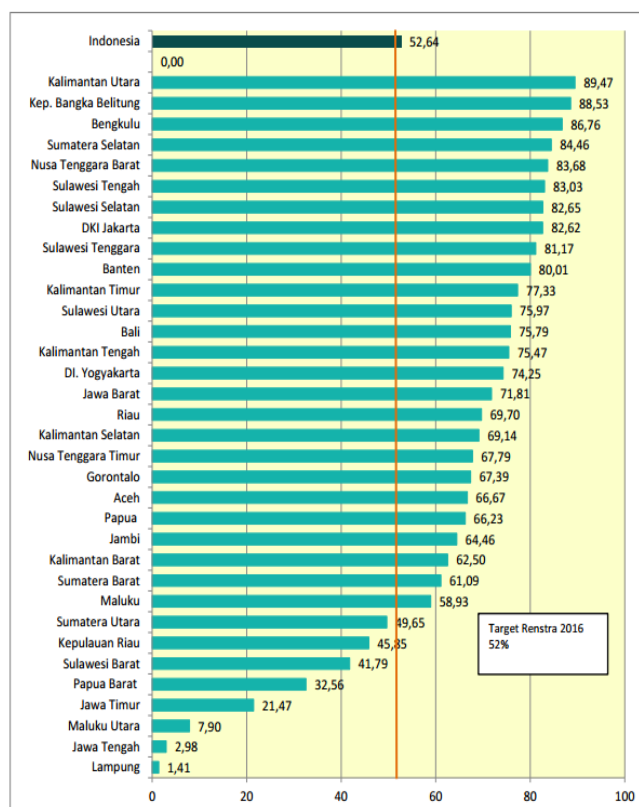
Mengacu pada tabel 4, setidaknya setiap kabupaten/kota memiliki 70 tempat bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah wajibnya sehari-hari. Di samping angka pada tabel, dimungkinkan jumlah yang tersedia sebenarnya lebih dari itu. Hal ini karena mengingat penduduk di NTB 96,47% -nya adalah Muslim (Badan Pusat Statistik (BPS), 2010), bila diasumsikan setiap penduduknya taat menjalankan ibadah wajibnya, setidaknya besar kemungkinan setiap wisatawan relatif mudah mendapat tempat untuk menunaikan ibadah sholat di sana.

Terkait fasilitas yang tersedia di NTB, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan, Kabupaten/Kota Sehat (KKS), KKS adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Berdasarkan data mengenai daerah yang telah melaksanakan tatanan kawasan sehat, seluruh kabupaten/kota di NTB telah menyelenggarakan tatanan kawasan yang sehat, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 5. Di samping itu, terkait dengan kesehatan juga, Kementerian Kesehatan RI (2017) telah memublikasikan data tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan, berdasarkan provinsi, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 6.



Gambar 5. Persentase Kabupaten/Kota Penyelenggara Tatanan Kawasan Sehat Tahun 2016 (Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2017)





Gambar 6. Persentase Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2016 (Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2017)

Mengacu pada gambar 6, 83,03% tempat-tempat umum di Provinsi NTB sudah memenuhi syarat kesehatan, bahkan menempati urutan kelima mengalahkan 28 provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak internal NTB, dalam hal ini adalah pemerintah dan warganya, sudah berupaya untuk menjadi daerah yang bersih dan nyaman. Hal ini akan memberikan kesan baik untuk penduduk di sana. Berkaitan dengan wisata halal, kebersihan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, mengingat dalam Islam, bersuci perlu dilakukan sebelum menunaikan ibadah, termasuk *sholat*, dengan menggunakan air yang dapat menyucikan. Dengan demikian, kondisi sanitasi di NTB mendukung terselenggaranya pariwisata halal.

### B. Weaknesses

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, NTB mendapatkan penghargaan kelas dunia terkait dengan pariwisata halalnya. Salah satu bukti yang memperlihatkan bahwa suatu tempat atau produk sudah bisa dikatakan halal adalah adanya sertifikat halal dari MUI. Dalam praktiknya, di Kota Mataram sebanyak 70 persen hotel dan restorannya sudah mendapatkan sertifikat halal (Afif, 2015). Kemudian Lalu Abdul Hadi selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB menyatakan bahwa mayoritas hotel dan restoran di Lombok rata-rata sudah bersertifikat halal (Nursyamsyi, 2017). Lebih spesifik, ia menyebutkan bahwa hotel-hotel yang sudah bersertifikat halal di sana dikategorikan dalam kelompok hilal 1, yang dalam Peraturan Gubernur NTB mengenai wisata halal disebutkan, adalah penggolongan usaha hotel syariah yang dianggap memenuhi semua kriteria usaha hotel syariah yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kebutuhan minimal wisatawan muslim (Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, 2015). Indikator hotel dengan kriteria yang lebih rinci dan sifatnya lebih ketat untuk beberapa poinnya, atau memberikan pelayanan moderat bagi wisatawan muslim, masuk dalam kategori hilal 2 (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2014). Namun demikian, jumlah hotel dan restoran yang sudah tersertifikasi ini belum cukup untuk memfasilitasi wisatawan dalam hal akomodasi serta tempat penyedia makanan dan minuman, mengingat adanya keterangan dari dua daerah tersebut tidak dapat serta merta mencerminkan kondisi keseluruhan provinsinya. Dengan kata lain, jumlah hotel dan restoran yang bersertifikasi halal di NTB harus ditambahkan.

Sejalan dengan hal tersebut, pihak MUI Provinsi NTB dalam Liputan6.com (2016) menyatakan proses sertifikasi halal hotel dan restoran di sana masih terbatas. Karena mayoritas hotel di NTB belum bersertifikat

halal, maka beberapa indikator yang tercantum dalam fatwa MUI, peraturan gubernur, dan peraturan daerah terkait *halal hotels* menjadi belum terpenuhi. Terlebih, yang sudah tersertifikasi halal pun masih masuk kategori hilal 1, di mana aturannya relatif longgar diperlihatkan dengan sifat aturan yang tidak mutlak. Secara lebih rinci, indikator yang belum dicapai adalah sebagai berikut:

- Menghindari hal-hal yang tidak sesuai aturan Islam, seperti maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; pertunjukan seni budaya (dan musik) yang menentang syariah.
- Masih terdapat kemungkinan tersedianya minuman beralkohol
- Ketiadaan prosedur operasional syariah
- Pakaian yang dikenakan belum mengikuti aturan dalam syariat Islam

Terkait sertifikasi halal untuk hal yang berhubungan dengan makanan dan minuman, Ketua LPPOM MUI-NTB, Rahun, menyampaikan bahwa ada 644 sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh MUI (Visit Indonesia, 2017), seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 5.

Tabel 5. Data Sertifikasi Halal Provinsi NTB Tahun 2012-2016

Jenis Usaha	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
UMKM	239	226	180	75	269
Rumah Makan	-	-	-	20	200
Restoran Hotel	-	-	-	5	75
Restoran Non-Hotel	-	-	-	75	100
Jumlah	239	226	180	175	664

Sumber: Hamzana (2017)

Lebih lanjut, Rahun dalam Hamzana (2017) menyebutkan bahwa NTB adalah provinsi yang paling banyak mendapatkan sertifikat halal selain DKI Jakarta, bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Namun Hamzana (2017) menyapaikan bahwa karena mayoritas usaha yang sudah tersertifikasi halal baru restoran, penyelenggaraan pariwisata halal di NTB belum optimal bila mengacu pada Peraturan Daerah NTB No. 2 Tahun 2016, mengingat kelengkapan fasilitas umum bagi wisatawan muslim pada destinasi wisata belum terpenuhi. Ia menambahkan, pelayanan untuk biro perjalanan, spa, dan akomodasi belum memperlihatkan peningkatan.

Menurut Ketua MUI NTB, Saiful Muslim, beberapa penyebab hal tersebut adalah (1) adanya perasaan takut kehilangan tamu hotel apabila legalitas sertifikasi halal dilakukan, dan (2) proses pengurusan sertifikasi halal yang dirasa terlalu berbelit-belit menurut manajemen hotel (Liputan6.com, 2016). Anggota Komisi II DPRD NTB, Raihan, dalam Liputan6.com (2016) berujar bahwa penyebab hal ini terjadi adalah (1) pelaksanaan sertifikasi halal yang belum dilakukan dengan fokus dan maksimal oleh para aparat serta (2) sosialisasi dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Disbudpar, Disperindag, maupun Dinas Kesehatan. Hal ini perlu sesegera mungkin diperhatikan sebab bisa jadi minimnya hotel dan restoran yang bersertifikasi halal membuat wisatawan yang telah memiliki ekspektasi tinggi terhadap wisata halal di NTB namun tidak terfasilitasi mengurungkan niatnya untuk kembali melakukan perjalanan wisata ke NTB. Padahal banyaknya wisatawan yang berkunjung berpotensi meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat.

Selain kehalalan yang dibuktikan dengan sertifikat MUI, hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Fatwa MUI, Perda dan Pergub NTB tentang wisata halal, di antaranya penggunaan Lembaga Keuangan Syariah untuk melayani kebutuhan sektor pariwisata di NTB. TGH Fauzan Zakaria Amin selaku Ketua Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia (APII) memahami bahwa praktik aplikasi nilai mulia di sektor riil maupun finansial dapat dilakukan dengan kolaborasi antara wisata halal dan keuangan syariah. Namun ia melanjutkan, ini belum diprioritaskan karena beberapa hal yang masih dipertimbangkan oleh para pelaku industri ini seperti adanya akses yang diberikan jasa keuangan konvensional tetapi tidak diberikan oleh jasa keuangan syariah, serta adanya anggapan bahwa jasa keuangan konvensional lebih unggul daripada jasa keuangan syariah (Kelana, 2017). Akan tetapi hal ini ke depannya perlu masuk dalam prioritas bersama, ujananya.

Berikutnya adalah fasilitas umum di destinasi wisata yang belum memadai, salah satunya di tempat wisata religi. Dilansir dari *website* Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (2016) bahwa salah satu Kawasan Wisata Religi, Pantai Cemara, Desa Lembar Selatan, kondisinya sangat memprihatinkan lantaran bangunan tempat para peziarah bezikir rusak tergerus air laut, ujar L. Hadi selaku penjaga di lokasi tersebut. Menurut uraiannya, warga membuat petanda menggunakan beton bercat putih sebagai solusi, setelah sebelumnya petanda berbahan kayu yang juga dibangun oleh warga tergerus air laut.

Terkait fasilitas di sana, pada kenyataannya kondisi tempat duduk pengunjung dan tempat tahlilan rusak parah karena sudah lama tidak diganti, tutur Kepala Satuan Petugas Linmas Lembar Selatan, L. Sahlan. Hal ini sangat disayangkan karena kawasan wisata sangat membutuhkan penyediaan fasilitas yang baik demi memberikan kenyamanan bagi para tamu. Dalam website tersebut, disampaikan bahwa pemerintah sudah berjanji untuk membangunkan fasilitas seperti Berugak –sejenis arsitektur tradisional berkaki empat Suku Sasak– yang difungsikan untuk tempat duduk pengunjung. Akan tetapi, ia sangat menyayangkan sebab hal tersebut tak terealisasi. Ia melanjutkan, pada akhirnya pengurus makam membangun mushalla berdasarkan swadaya hasil amal pengunjung yang datang. Dengan demikian, mushalla yang telah dibangun oleh masyarakat sendiri tampaknya bisa berguna untuk mengakomodasi berbagai kegiatan wisatawan, khususnya ibadah-ibadah sebagai bagian dari wisata religi.

Hal lain yang juga penting dalam bidang pariwisata adalah pemandu wisata. Untuk wisata halal, tentunya terdapat kriteria khusus yang perlu dipenuhi agar dapat melayani wisatawan dengan baik sesuai prosedur. Setelah Lombok memenangkan *World Halal Travel Award 2015*, keberadaan pemandu wisata di Lombok dan Sumbawa yang kemampuannya lebih khusus semakin diperlukan, terutama yang menguasai Bahasa Arab dan Perancis sebab sampai saat ini jumlahnya masih kurang, menurut Ainudin selaku Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB dalam Ridwan (2015).

Selain itu, hal lain yang tak kalah penting diperhatikan adalah *amenity*. Penelitian Khalik (2014) untuk Kawasan Pariwisata Kuta Lombok memberikan hasil di antaranya pengelolaan parkir masih belum terorganisir dengan baik, pedagang asongan yang menawarkan produknya dengan agresif, dan orientasi penyedia jasa transportasi pada keuntungan sepihak. Menurutnya, permasalahan ini membuat wisatawan tidak nyaman dalam berwisata di Lombok. Kondisi ini termasuk dalam kelemahan, namun tentu bisa diperbaiki.

Di luar peraturan yang berlaku di Indonesia, indikator untuk wisata halal yang lebih ideal adalah diperlukannya pakaian yang sesuai syariat ketika berwisata –termasuk ke pantai–, bahkan lebih ketatnya, Gabdrakhmanov *et al* (2016) menyebutkan, *halal resorts* memisahkan pantai berdasarkan gender. Terkait hal ini, Esthy Reko Astuty selaku Deputy Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan bahwa aturan mengenai pakaian tidak bisa diterapkan untuk semua pantai di Lombok, mengingat adanya risiko penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke NTB (Yuanita, 2015). Ia melanjutkan, wisata halal di sini diadakan sebagai alternatif produk bagi turis muslim yang berkunjung ke Indonesia, dengan memberikan ketersediaan makanan dan hotel yang halal, serta kenyamanan dalam beribadah dan menikmati objek wisata. Terlebih untuk aturan mengenai pemisahan wisatawan perempuan dan laki-laki yang hendak ke pantai, sampai saat ini tidak diberlakukan. Namun hal tersebut sudah direncanakan sebagaimana disebutkan oleh Lalu Moh. Faozal selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadispar) NTB, dengan sebutan konsep pantai halal (PT BFI Finance Indonesia Tbk, 2018), di mana saat ini sedang merancang bentuknya dan diharapkan sudah dapat dimulai pembangunannya.

### C. Opportunities

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Provinsi NTB adalah beroperasinya bandara-bandara yang berada di Provinsi NTB. Terdapat tiga bandara yang beroperasi di Provinsi NTB, satu di antaranya merupakan bandara internasional. Hal ini dapat menjadi akses bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke NTB. Peluang yang dapat dimanfaatkan setidaknya adalah dari wisatawan yang secara langsung berangkat dari kotanya menuju Provinsi NTB. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website FlightRadar24*, kota asal maupun tujuan penerbangan dari dan menuju Lombok yaitu Jakarta (CGK), Surabaya (SUB), Denpasar (DPS), Bima (BMU), Sumbawa Besar (SWQ), Kuala Lumpur (KUL) – Malaysia, Jakarta (HLP), Makassar (UPG), Banjarmasin (BDJ), Bandung (BDO), Kupang (KOE), Yogyakarta (JOG), Surakarta (SOC), Semarang (SRG), dan Singapura (SIN) – Singapura, melalui Bandara Internasional Lombok, Lombok (LOP) (FlightRadar24, 2018a). Sedangkan melalui Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima (BMU), adalah penerbangan dari dan menuju Lombok (LOP), Denpasar (DPS), dan Makassar (UPG) (FlightRadar24, 2018b). Bandara terakhir adalah Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa Besar, Sumbawa Besar (SWQ), untuk mengakomodasi penerbangan dari dan ke Lombok (LOP) (FlightRadar24, 2018c).

Berdasarkan data tersebut, terdapat 15 kota yang memiliki akses menuju sekaligus rute kembali dari Provinsi NTB. Sebagai keterangan, semua kota yang tercantum adalah kota di dalam negeri, Indonesia, kecuali dua negeri jiran, Malaysia dan Singapura. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah dari jumlah penduduk yang melakukan perjalanan di NTB dan kemungkinan penduduk yang melanjutkan perjalanan dari kota lain sebelum ke kota di NTB. Dalam hal ini, keterangan mengenai maksud kunjungan utama penduduk yang datang ke suatu daerah ditunjukkan dengan data per provinsi NTB oleh tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Penduduk yang Melakukan Perjalanan menurut Provinsi Tujuan dan Maksud Kunjungan Utama, selama Januari – Juni 2016

	NTB	DKI Jakarta	Jawa Timur	Bali	Sulawesi Selatan	Kalimantan Selatan	Jawa Barat	NTT	DI Yogyakarta	Jawa Tengah
Berlibur/ Rekreasi	44,70	36,04	40,27	35,49	29,64	25,38	47,61	19,25	67,46	42,31
Profesi/ Bisnis	2,39	9,59	2,00	1,37	3,57	3,41	1,79	6,74	1,60	1,22
Misi/ Pertemuan/ Kongres	0,82	4,11	0,44	0,81	0,81	0,80	0,70	1,43	0,78	0,45
Pendidikan/ Pelatihan	1,85	5,08	0,97	1,48	2,42	1,39	1,81	2,97	1,82	0,94
Kesehatan/ Berobat	2,83	2,40	1,23	1,03	2,91	1,62	0,77	3,30	0,93	1,21
Berziarah/ Keagamaan	3,53	1,81	11,57	22,93	2,38	12,83	5,10	2,47	1,80	7,51
Mengunjungi Teman/Keluarga	39,59	37,95	41,01	34,55	53,06	50,88	39,30	57,72	23,35	43,76
Olahraga/ Kesenian	1,36	0,54	0,58	0,40	0,27	0,23	1,20	0,20	0,33	0,86
Lainnya	2,94	2,48	1,93	1,93	4,94	3,46	1,73	5,91	1,93	1,73
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik & Kementerian Pariwisata (2016)

Warna merah muda dan biru pada tabel 4 memperlihatkan proporsi terbesar dan kedua terbesar dari tujuan dan maksud utama penduduk berkunjung ke suatu provinsi. Mengacu pada tabel 4, hampir pada seluruh provinsi, penduduk berkunjung dengan tujuan utama untuk berlibur/rekreasi dan mengunjungi teman/keluarga. Pada Provinsi NTB sendiri, penduduk yang datang dominan karena alasan berlibur/rekreasi, sehingga hal ini menjadi peluang peningkatan pendapatan untuk sektor pariwisata NTB. Begitu pun dengan penduduk yang berkunjung pada tempat lainnya, ada kemungkinan untuk melanjutkan perjalanannya ke NTB untuk berwisata setelah berekreasi di kota sebelumnya. Misalnya terdapat sekelompok orang yang berwisata ke Bali, kemudian sebelum kembali ke kota asalnya, mereka singgah ke NTB untuk menikmati destinasi pariwisata di sana.

Kesempatan lainnya adalah berupa dukungan pemerintah. Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata, Dadang Rizki Ratman, dalam dokumen Kementerian Pariwisata Indonesia (2016), salah satu daerah yang diprioritaskan adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat, ditunjukkan oleh Gambar 7.



Gambar 7. Lokasi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (Sumber: Kementerian Pariwisata Indonesia, 2016)

Bahkan, apabila dilihat dari analisis performansi setiap destinasi pariwisata prioritas, Mandalika memiliki jumlah wisman terbanyak dan penerimaan devisa terbesar dibandingkan kesembilan daerah lainnya, yang diperlihatkan oleh Tabel 7.

Tabel 7. Performansi dan Proyeksi Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas

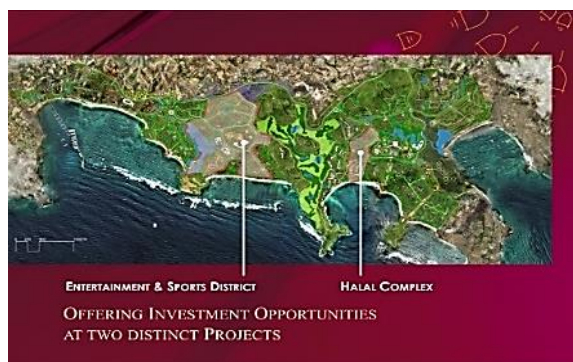
No	Destinasi	Performansi				Proyeksi 2019		
		Jumlah Wisman						
		2012	2013					
1	Borobudur	199,982	227,337	17.19	27,337,000	1,520	2,000,000	2,000
2	Mandalika	121,482	125,307	3.15	125,307,000	3,600	1,000,000	1,000
3	Labuan Bajo	41,972	54,147	29.01	54,147,000	1,200	500,000	500
4	Bromo-Tengger- Semeru	34,466	33,387	-3.13	33,387,000	1,200	1,000,000	1,000
5	Kepulauan Seribu	4,627	16,384	254.10	16,384,000	1,020	500,000	500
6	Toba	15,464	10,680	-30.94	10,680,000	1,000	1,000,000	1,000

7	Wakatobi	2,179	3,315	52.13	3,315,000	1,400	500,000	500
8	Tanjung Lesung	8,336	1,739	-79.14	1,739,000	5,600	1,000,000	1,000
9	Morotai	618	500	-19.09	500,000	3,600	500,000	500
10	Tanjung Kelayang	975	451	-53.74	451,000	1,660	500,000	500

Sumber: Kementerian Pariwisata Indonesia (2016)

Sektor pariwisata Mandalika berpotensi untuk dikembangkan, termasuk dalam hal pariwisata halal. Bahkan, visi yang dimiliki oleh Mandalika adalah “*World Best Halal Tourism and Cruise Destination*” dan tujuannya yaitu “menjadikan pilihan destinasi pariwisata halal terbaik di dunia bagi wisatawan muslim, khususnya dan menjadi *entry point* wisata *cruise* dunia di Pulau Lombok yang mampu menarik kunjungan 1 juta wisman pada tahun 2019” (Kementerian Pariwisata Indonesia, 2016). Hal ini menggambarkan bahwa Mandalika, yang merupakan bagian dari NTB mendapatkan dukungan juga dari pemerintah pusat, sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan modal yang besar untuk mengembangkan pariwisata halalnya.

Di samping itu, dalam mencapai tujuan dan visi Mandalika itu sendiri, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) (n.d.) pun sudah memiliki program yang mengarah pada pariwisata halal. Dalam proyek pengembangannya, ITDC telah merencanakan untuk membangun “Halal Complex” di Mandalika, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8. Dengan demikian, keseluruhan pendukung ini perlu dimanfaatkan demi mencapai visi dan tujuan yang telah dirumuskan.



Gambar 8. Halal Complex Project, Mandalika (Sumber: Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), n.d.)

#### D. Threats

Ancaman yang mungkin muncul terkait perkembangan Sektor Pariwisata Halal di Provinsi NTB adalah negara lain yang juga mengembangkan hal yang sama. Menurut Menteri pariwisata Indonesia Arief Yahya, jumlah *outbound* Timur Tengah mencapai sekitar 120 juta dan di Kawasan Asia Tenggara, negara yang banyak menerima wisman dari daerah tersebut adalah Thailand dan Malaysia (Tribunnews.com, 2016). Data tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat dalam hal penerimaan wisatawan mancanegara, setelah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Malaysia sendiri penduduknya mayoritas beragama Islam dan menurut *Mastercard-Crescentrating* (2018), negara ini menempati urutan pertama destinasi tujuan terbaik wisatawan Muslim dalam berbagai kriteria *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2018, selama delapan tahun berturut-turut. Sedangkan untuk tahun 2018 sendiri Indonesia menduduki urutan kedua. Indonesia, khususnya tiga provinsi utama, termasuk NTB, tengah mengembangkan potensi wisata halalnya guna meningkatkan wisatawan, terutama wisatawan muslim yang kini sudah semakin sensitif terhadap kehalalan atas sesuatu. Persiapan nampaknya harus dilakukan dengan segera agar wisatawan mancanegara maupun nusantara mengenal wisata halal di Indonesia, tidak hanya di Malaysia yang memang sudah berkembang.

Selanjutnya, terkait destinasi yang banyak diminati, berdasarkan hasil penelitian Nurdiansyah (2018) salah satunya disebutkan, bahwa pemerintah Thailand menyadari bahwa pariwisata adalah sektor yang berperan penting dalam ekonomi. Lalu menurutnya, pariwisata halal seharusnya menjadi kebijakan penting dalam meningkatkan jumlah turis muslim dalam menaikkan perekonomian negaranya, mengingat proyeksi terhadap Turis Muslim akan meningkat cukup pesat secara global di tahun 2020. Ia pun menyebutkan bahwa Thailand sebagai negara yang dijadikan destinasi menarik bagi banyak wisatawan, menyediakan tempat yang “ramah muslim”, dengan menampilkan logo halal baik pada restoran maupun hotel. Di Thailand pun terdapat *Islamic Centre* sebagai pusat komunitas Muslim di Bangkok, berdiri masjid-masjid menarik, dan tersedia *Muslim-friendly* App untuk membantu wisatawan menemukan restoran dan hotel halal, masjid, dan *halal tours* di Thailand (Nurdiansyah, 2018). Ia menambahkan, Thailand juga tengah mendorong pariwisata halal dan meluncurkan insentif *marketing* pada berbagai agensi terkait. Melihat upaya dan berbagai kondisi pariwisata

Halal di Thailand, secara tidak langsung ancaman bagi Indonesia, khususnya NTB, adalah dalam menarik dan mempertahankan wisatawan. Thailand yang begitu gencar dan berani melakukan sertifikasi atas produknya, bisa semakin menarik wisatawan, khususnya wisatawan Muslim, dan membuat mereka nyaman berwisata di Thailand.

Mengingat pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Provinsi NTB masih perlu banyak mempersiapkan diri untuk mengembangkan pariwisata halalnya, maka berkembangnya pariwisata halal di tempat lain bisa menjadi ancaman bagi NTB. Dengan demikian, ancaman ini perlu menjadi perhatian oleh Provinsi NTB demi mengembangkan potensinya agar tidak kalah saing dengan negara lain, termasuk negara yang kaum muslimnya sebagai minoritas.

Ancaman lain yang mungkin muncul adalah perilaku negatif yang mungkin dilakukan ketika wisatawan berkunjung ke NTB. Terkadang wisatawan tidak menjaga lingkungan dengan baik seperti membuang sampah sembarangan atau mencorat-coret/merusak objek pada tempat wisata. Di samping itu, kemungkinan masuknya budaya luar yang tidak selaras dengan budaya di NTB sebenarnya bisa jadi ancaman juga jika pada akhirnya mendominasi budaya yang ada di NTB. Hal ini dimungkinkan mengurangi keunikan dari pariwisata di NTB itu sendiri.

Berikutnya, bencana alam menjadi salah satu bentuk ancaman di luar hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, sejak akhir bulan Juli 2018, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7 SR yang menelan lebih dari 500 orang korban jiwa, menimbulkan banyak korban luka-luka, dan kerusakan bangunan (Suci, 2018). Terjadinya gempa bumi ini tidak hanya menyebabkan perubahan kondisi fisik objek wisata, munculnya rasa trauma bagi penduduk di sana juga memberikan dampak pada kesiapan mereka menerima tamu. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa frekuensi gempa yang terjadi di Lombok mencapai 1.973 kali (Septia, 2018). Mengetahui berita bahwa guncangan gempa tidak hanya sekali, tentunya membuat para calon wisatawan berpikir ulang dalam memilih NTB sebagai destinasi wisata. Secara tidak langsung, bencana alam berpotensi menurunkan pendapatan di sektor pariwisata karena keengganan wisatawan untuk berwisata ke NTB. Hal ini menjadi ancaman yang perlu diantisipasi oleh pihak-pihak penyedia destinasi wisata, termasuk wisata halal di Provinsi NTB.

Keterangan mengenai komponen-komponen SWOT yang sudah di bahas secara rinci satu per satu pada bagian pembahasan, dirangkum dalam Tabel 8, 9, dan 10. Ketiga tabel ini menunjukkan kondisi pariwisata halal di NTB. Lebih rinci, Tabel 8 menunjukkan komponen yang berada di luar indikator wisata halal, sementara Tabel 9 dan 10 didasarkan pada indikator-indikator pariwisata halal, baik dari literatur internasional maupun dari peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada kolom paling kanan tabel, terdapat keterangan untuk pariwisata di NTB itu sendiri, berisi huruf S, W, O, atau T, di mana masing-masing adalah *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat*. Sedangkan Tabel 11 memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan strategi yang mungkin digunakan untuk mengembangkan Sektor Pariwisata Halal NTB berdasarkan analisis SWOT yang sudah dilakukan.

Tabel 8. Keterangan Komponen SWOT Pariwisata NTB di luar Indikator Pariwisata Halal

No	Keterangan Komponen SWOT Pariwisata NTB di luar Indikator Pariwisata Halal	Ket
1	Beroperasinya bandara-bandara di NTB baik yang lokal maupun internasional, memungkinkan: - Wisatawan mendapat akses yang mudah untuk datang dan pulang, ke dan dari NTB - Wisatawan yang telah berlibur dari tempat wisata di kota lain yang juga merupakan rute pesawat di bandara NTB berkemungkinan untuk datang ke NTB juga untuk melanjutkan liburannya.	O
2	Banyaknya negara-negara yang mengembangkan industri yang sama, baik yang mayoritasnya muslim maupun non-muslim.	T

			Peraturan di Indonesia (Fatwa MUI, Pergub NTB, Perda NTB)			
			Indikator	Berlaku untuk		
1	Fasilitas Ibadah	Tersedia fasilitas ibadah (ruang ibadah, alat ibadah, arah kiblat, peringatan adzan (M. M Battour <i>et al</i> (2010), JC Henderson (2010), Javed (2007), dan Stephenson (2014) dalam Battour <i>et al</i> (2018), dan akses yang mudah ke tempat ibadah) (Jaelani, 2017b).	Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah ( <i>lebih detil ada pada lampiran peraturan Menteri Pariwisata</i> )	Destinasi wisata, spa, akomodasi	- Tersedianya tempat ibadah di banyak tempat (memiliki sebutan “Pulau Seribu Masjid) - Tempat-tempat umum di NTB sudah memenuhi syarat kesehatan.	S
2	Bukti Halal	Terstandarisasi untuk destinasi dan fasilitasnya (Jaelani, 2017b)	Memiliki sertifikat halal dari MUI.	Makanan dan minuman di destinasi wisata, hotel, spa, biro perjalanan, akomodasi, penyedia makan dan minum; produk-produk di Spa.	Belum semua tersertifikasi, namun dari tahun ke tahun UMKM yang sudah tersertifikasi jumlahnya terus meningkat. Belum semua bersertifikat Halal dari MUI karena: - Rasa takut kehilangan tamu hotel jika ada cap halal - Pengurusan sertifikasi halal terlalu berbelit-belit - Pelaksanaannya belum fokus dan maksimal oleh aparat negara - Sosialisasi dan koordinasi belum berjalan dengan baik.	W
3	Menghindari unsur-unsur tertentu	Kemusyrikan (Jaelani, 2017b), prostitusi (Battour, <i>et al</i> , 2018) dan musik (Gabbrakhmanov <i>et al</i> , 2016)	Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; pertunjukan seni budaya (dan musik) yang menentang syariah.	Destinasi wisata, akomodasi	Belum 100% terlaksana. Salah satu ukurannya adalah jumlah hotel yang sudah tersertifikasi halal. Jikapun sudah, hotel yang tersertifikasi halal baru masuk kategori hilal 1 yang peraturannya relatif longgar, misal untuk minuman beralkohol.	W
4	Penggunaan pakaian	Sesuai syari’at Islam (Gabbrakhmanov <i>et al</i> , 2016)	Sesuai syari’at Islam	Akomodasi dan Pemandu Wisata Syariah	Belum sepenuhnya terlaksana, baik itu di destinasi wisata maupun di akomodasi (hotel kategori hilal 1 tidak memutlakkkan aturan ini).	W
5	Lembaga Keuangan	Halal untuk kategori <i>halal hotels</i> (Bogan & Sarri sk, 2018)	Layanannya menggunakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).	Akomodasi dan Biro Perjalanan Syariah	Masih minim yang menggunakan layanan dari LKS. Namun sinergi untuk hal ini terus diupayakan sebagaimana BNI memberikan layanan yang memudahkan bisnis wisata halal mengakses kebutuhan keuangan sesuai Syariah.	W

Tabel 10. Keterangan Komponen SWOT Pariwisata NTB berdasarkan Indikator Pariwisata Halal (Berdasarkan Aturan Khusus Kegiatan Usaha)

No	Aturan Khusus	Indikator berdasarkan literatur internasional	Peraturan di Indonesia (Fatwa MUI, Pergub NTB, Perda NTB)	Implementasi di NTB	Ket
				- Tujuan utama wisatawan datang ke NTB adalah untuk rekreasi. - Tujuan wisatawan datang ke 15 kota lainnya juga kebanyakan untuk berlibur dan kunjungan keluarga (melanjutkan wisata ke NTB).	O
				- Terdapat destinasi wisata yang bisa mendukung indikator-indikator tersebut - Kentalnya jati diri masyarakat Lombok dengan pengembangan nilai-nilai agama Islam	S
				- Fasilitas umum perlu perbaikan	W

Tabel 10. Keterangan Komponen SWOT Pariwisata NTB berdasarkan Indikator Pariwisata Halal (Berdasarkan Aturan Khusus Kegiatan Usaha)

No	Aturan Khusus	Indikator berdasarkan literatur internasional	Peraturan di Indonesia (Fatwa MUI, Pergub NTB, Perda NTB)	Implementasi di NTB	Ket
		2017b)	kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi tempat duduk dan tempat tahlilan rusak.</li> <li>- pengelolaan parkir belum baik,</li> <li>- kebersihan lingkungan belum terorganisir</li> <li>- pedagang asongan agresif</li> </ul>	
				- Perilaku negatif yang dilakukan wisatawan (tidak menjaga alam, objek wisata, dan budaya)	T
2	Akomo-dasi	Terdapat pemisahan fasilitas bagi perempuan dan laki-laki untuk kolam renang, spa, pantai, restoran, kafetaria (Gabdrakhmanov <i>et al</i> , 2016), ruang olahraga (Bogan & Sarı sık, 2018), lantai (M Stephenson, (2014) dalam Battour <i>et al</i> (2018)); fasilitas khusus keluarga: kolam, pantai, dan villa (Gabdrakhmanov <i>et al</i> , 2016).	<p>Fasilitas aman, nyaman, kondusif untuk keluarga dan bisnis; hotel syariah memiliki prosedur operasional syariah.</p> <p>Keterangan: Pemisahan fasilitas kolam renang, olahraga, rekreasi, dan kebugaran berdasarkan gender di Indonesia hanya berlaku mutlak untuk hotel dalam kategori hilal 2 dan pemisahan tersebut dilakukan berdasarkan waktu, bukan ruang.</p> <p>Standar operasional syariah hanya berlaku pada hotel berkategori hilal 2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata-rata belum memiliki peraturan operasional Syariah karena kebanyakan hotel di sana masih dalam kategori hilal 1.</li> <li>- Pemisahan fasilitas bagi perempuan dan laki-laki belum banyak diimplementasikan.</li> <li>- Sebagai tambahan, pemisahan pantai sudah direncanakan namun pelaksanaannya belum dilakukan.</li> </ul>	W
3	Spa	-	Ruangan perawatan terpisah antara pria dan wanita; terapis disesuaikan dengan gender tamu; terjaganya kehormatan wisatawan.	Belum secara keseluruhan mengikuti aturan Syariah Islam.	W
				Belum secara keseluruhan mengikuti aturan Syariah Islam.	W
				Sudah ada paket pariwisata Halal dari Asita NTB	S
5	Pemandu Wisata Syariah	-	Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggungjawab, memberi nilai-nilai Islam selama perjalanan wisata, memiliki wawasan dan kompetensi luas tentang wisata halal, dan berkompotensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku (dibuktikan dengan sertifikat).	Masih banyak perlu diberikan pelatihan bagi para Pemandu Wisata agar mampu melayani para tamu untuk wisata halal, khususnya tamu mancanegara yang berkomunikasi dengan Bahasa asing.	W
6	Wisatawan	Memiliki niat untuk mendapat ridho Allah SWT (Bogan & Sarı sık, 2018), memperkuat keyakinan akan keesaan Allah dengan merefleksikan kekaguman dan menikmati keindahan ciptaan Allah, bebas dari dosa (Jaelani, 2017b).	Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (fasad); menjaga kewajiban ibadah selama berwisata; menjaga akhlak mulia; menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.	<p>Diakomodasi oleh NTB yang mengupayakan terwujudnya wisata halal NTB, ditunjukkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visi dan misi pemerintah daerah sesuai dengan pengembangan wisata halal,</li> <li>- sejalannya profil Gubernur NTB dengan pengembangan pariwisata halal,</li> <li>- misi gubernur periode berikutnya juga mengarah pada pengembangan sektor pariwisata,</li> <li>- ada dukungan dari APII</li> </ul>	S



Tabel 11. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Analisis SWOT

	<p><b>STRENGTHS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keselarasan visi-misi Pemerintah Daerah dengan pengembangan wisata halal.</li> <li>2. Kentalnya jati diri masyarakat Lombok dengan pengaplikasian nilai-nilai Agama Islam.</li> <li>3. Sejalannya profil kepala daerah di Provinsi NTB dengan pengembangan pariwisata halal.</li> <li>4. Pemimpin daerah periode berikutnya juga memiliki misi dan program yang mendukung pengembangan pariwisata, penerapan nilai agama, dan sosial-budaya yang dapat mendorong berkembangnya wisata halal.</li> <li>5. APII NTB merintis program pembentukan 100 desa wisata halal di Lombok dan NTB</li> <li>6. Ketersediaan banyak destinasi wisata, baik alam, budaya, buatan, maupun religi.</li> <li>7. Tersedianya banyak tempat ibadah.</li> <li>8. Kondisi seluruh kabupaten/kota di NTB bersih (mendukung terlaksananya ibadah).</li> </ol>	<p><b>WEAKNESSES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan usaha wisata masih banyak yang belum bersertifikat halal.                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Akomodasi (Hotel/ Penginapan)</u> Mayoritas hotel di Mataram dan Lombok yang sudah bersertifikat halal masih di kategori hilal 1, sehingga belum mencapai:                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari hal yang dilarang Islam (misal: pertunjukan seni yang menentang syariah).</li> <li>- Adanya minuman beralkohol</li> <li>- Tidak ada prosedur operasional syariah.</li> <li>- Pakaian tidak syar' i.</li> </ul> </li> <li>b. <u>Fasilitas penyedia makanan dan minuman.</u> Sudah ber-<i>progress</i>, namun perlu dilakukan oleh seluruh UMKM, rumah makan, restoran hotel, restoran non-hotel.</li> <li>c. <u>Biro perjalanan</u> Belum sepenuhnya mengikuti syariat Islam</li> <li>d. <u>Spa</u> Belum sepenuhnya mengikuti syariat Islam</li> </ol> </li> <li>2. Belum terintegrasinya wisata halal dengan Lembaga Keuangan Syariah.</li> <li>3. Fasilitas umum di tempat wisata belum memadai.</li> <li>4. Pemandu wisata belum mumpuni melayani kebutuhan wisata halal.</li> <li>5. Tingkat kenyamanan masih rendah                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan parkir belum terorganisir</li> <li>b. Pedagang asongan yang agresif</li> <li>c. Orientasi penyedia transportasi sangat <i>oportunis</i>.</li> </ol> </li> <li>6. Aturan penggunaan pakaian syar' i tidak di semua tempat (misal: pantai) dan belum ada pemisahan gender di pantai.</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNITIES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beroperasinya bandara-bandara di NTB (Internasional dan Nasional) dengan banyak rute ke dan dari kota besar dan kota wisata.                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akses mudah untuk para wisatawan</li> <li>b. Menjadi destinasi lanjutan</li> </ol> </li> <li>2. Dukungan pemerintah dalam memprioritaskan KEK Mandalika, NTB, sebagai destinasi yang sangat potensial bagi ekonomi, dan akan dikembangkan pariwisata halalnya (akan dibentuk <i>halal complex</i> di Mandalika).</li> </ol>	<p><b>Kerja sama</b> antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, APII, pelaku usaha, dan masyarakat untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengembangkan wilayah halal di NTB (<b>mengorganisir, melaksanakan, dan memantau terselenggaranya program</b>)</li> <li>- <b>mempertahankan kualitas</b> destinasi wisata, rumah-rumah ibadah, kebersihan lingkungan (ada kegiatan rutin untuk jaga kebersihan di destinasi, rumah ibadah, jalan, dll)</li> <li>- <b>meningkatkan dan mempertahankan suasana islami masyarakat</b> dengan menyelenggarakan kegiatan rutin di <i>Islamic Center</i> dan masjid-masjid di NTB</li> <li>- meningkatkan kualitas layanan di bandara</li> </ul> <p><b>Menambah rute penerbangan</b></p>	<p>Seiring berjalannya pengembangan Mandalika, masyarakat dan para pelaku usaha yang akan terlibat di sana perlu diberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sosialisasi wisata halal</b></li> <li>- <b>Pelatihan terkait wisata halal</b> (misalnya pemandu wisata, petugas parkir, pedagang, pegawai di bandara, dll).</li> </ul> <p><b>Memperbaiki dan mempersiapkan fasilitas umum</b> yang memadai, untuk yang sudah ada dan yang sedang direncanakan.</p> <p><b>Memberikan subsidi, insentif dan kemudahan administratif</b> untuk usaha-usaha yang akan melakukan <b>sertifikasi halal MUI</b>.</p>
<p><b>THREATS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negara lain yang menjadi pesaing karena mengembangkan hal serupa.</li> <li>2. Perilaku negatif wisatawan                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menjaga lingkungan:                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuang sampah sembarangan</li> <li>- Mencorat-coret objek wisata</li> </ul> </li> <li>b. Kontaminasi budaya dari luar (mengurangi keunikan NTB)</li> </ol> </li> <li>3. Bencana alam</li> </ol>	<p>Perencanaan dan pelaksanaan <b>program destinasi wisata halal</b> di NTB bisa dilakukan dengan <b>belajar dari negara lain</b></p> <p>Masyarakat sudah <b>diajari nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan cinta kebersihan lingkungan sejak dini dan berlanjut hingga tua</b>, sehingga akan lebih mudah mengajak wisatawan, memberi contoh, dan mengorganisir destinasi wisata agar tetap islami, berbudaya, dan bersih. Jika perlu, ditambahkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat sampah di banyak tempat</li> <li>- Papan peringatan</li> <li>- Petugas kebersihan</li> <li>- Kegiatan rutin bersih-bersih</li> </ul> <p><b>Belajar</b> dari negara lain untuk <b>mendirikan bangunan anti gempa</b> atau bencana lain.</p>	<p><b>Belajar dari negara lain</b> yang sudah <b>menerapkan wisata halal di setiap kegiatan usaha</b>, menyediakan fasilitas umum, pemandu wisata, dan kenyamanan.</p> <p>Mempergunakan <b>tiga bahasa</b> dalam penyampaian info, misal di marka jalan destinasi wisata atau papan pengumuman, terdapat bahasa Indonesia, Inggris, dan lokal.</p> <p>Pemberian <b>pelatihan dan sosialisasi pada para calon pemandu wisata</b>, di mana di dalamnya ada penjelasan mengenai budaya, agama, dan lingkungan; penyediaan <b>paket wisata</b> yang juga bersifat memperkenalkan budaya lokal NTB.</p>

## VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis SWOT yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Provinsi NTB dalam mengembangkan pariwisata halal adalah kuatnya dorongan pemerintah daerah, eratnya orientasi masyarakat NTB dengan Islam, adanya dukungan APII dengan programnya berupa pembentukan 100 desa wisata halal, ketersediaan banyak destinasi wisata, dan keberadaan tempat dan fasilitas ibadah menjadi dasar kekuatannya. Kelemahannya yaitu masih belum maksimal jumlah kegiatan usaha yang mengantongi sertifikat halal dari MUI, belum terintegrasi antara kegiatan usaha syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah, penerapan aturan pakaian syar'i belum menyeluruh diberlakukan, serta masih belum optimalnya penyediaan fasilitas umum dan layanan bagi wisatawan. Sedangkan peluangnya adalah akses yang relatif mudah bagi turis untuk berkunjung ke NTB dan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia, khususnya NTB. Lalu ancamannya adalah negara-negara "pesaing" yang juga mengembangkan Pariwisata Halal, adanya kemungkinan masuknya budaya yang tak sejalan dan sikap negatif terkait kelestarian lingkungan dari wisatawan, dan bencana alam.

Strategi yang dapat dibuat dengan berdasar pada hasil Analisis SWOT di antaranya dengan melakukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, APII, para pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengorganisir, melaksanakan, dan memantau terselenggaranya program-program wisata halal; menumbuhkan suasana pendidikan Islami, berbudaya lokal, dan cinta lingkungan sejak dini; menyediakan tempat sampah dan papan peringatan di banyak lokasi, mempekerjakan lebih banyak petugas kebersihan, serta melaksanakan kegiatan kebersihan rutin untuk mempertahankan kualitas kebersihan rumah ibadah dan lingkungan; menyelenggarakan kegiatan pengajian (atau kegiatan serupa lainnya) secara rutin di masjid-masjid NTB untuk mempertahankan kekentalan sifat islami masyarakat; menambah rute penerbangan; melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait wisata halal yang di dalamnya termasuk juga wisata budaya dan alam bagi pelaku usaha dan masyarakat; memperbaiki dan mempersiapkan fasilitas umum; memberikan kemudahan birokrasi dan insentif untuk sertifikasi halal; melakukan studi banding ke negara lain sebagai referensi pengimplementasian wisata halal, penyediaan fasilitas umum, pemandu wisata, dan pendirian bangunan anti-bencana, di berbagai tempat yang kemudian diteliti lebih lanjut; mempergunakan tiga bahasa dalam penyampaian info untuk memperkenalkan dan mempertahankan bahasa lokal (misal pada marka di destinasi wisata); serta melakukan promosi yang lebih gencar terhadap nusantara maupun dunia. Dengan menyusun dan menerapkan strategi berdasarkan hasil analisis, diharapkan NTB semakin baik dalam mengembangkan Pariwisata Halalnya demi memajukan kondisi perekonomian Indonesia khususnya NTB, serta bisa menjadi *benchmark* bagi provinsi lain dalam memajukan bidang ini.

## ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang merupakan bagian dari CES UNPAR, atas pemberian saran dan masukan demi membantu membangun pemikiran dan penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, I. (2015, Desember 23). *70 Persen Hotel dan Restoran di Mataram Telah Tersertifikasi Halal*. Retrieved from Halhalal: <http://www.halhalal.com/70-persen-hotel-dan-restoran-di-mataram-telah-tersertifikasi-halal/>
- Badan Pusat Statistik & Kementerian Pariwisata. (2016). *Statistik Profil Wisatawan Nusantara Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik & Kementerian Pariwisata.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2010). *Penduduk menurut wilayah dan agama yang dianut*. Indonesia: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Retrieved June 25, 2018, from <https://ntb.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/155>
- Battour, M., Hakimian, F., Ismail, M., & Boğan, E. (2018). The perception of non-Muslim tourists towards halal tourism: Evidence from Turkey and Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 9(4), 823-840.
- Bidang IKP Dinas KOMINFOTIK NTB. (2018, September 26). *Ini visi misi gubernur dan wakil gubernur NTB periode 2018-2023*. Retrieved from Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat: <https://www.ntbprov.go.id/detailpost/ini-visi-misi-gubernur-dan-wakil-gubernur-ntb-periode-2018-2023>
- Bogan, E., & Saru sik, M. (2018). Halal tourism: conceptual and practical challenges. *Journal of Islamic Marketing*. doi:<https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2017-0066>
- Bull, A. (1995). *The economics of travel and tourism* (2nd ed.). Melbourne: Longman.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (4th ed.). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2016). Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 108 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama. (2016, Agustus 8). Tiga alasan Lombok layak jadi destinasi wisata halal. Kementerian Agama. Retrieved from <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/tiga-alasan-lombok-layak-jadi-destinasi-wisata-halal>
- FlightRadar24. (2018a). Lombok International Airport - Indonesia. Retrieved June 30, 2018, from <https://www.flightradar24.com/data/airports/lop>
- FlightRadar24. (2018b). Sultan Muhammad Salahuddin Airport - Indonesia. FlightRadar24. Retrieved from <https://www.flightradar24.com/data/airports/bmu>
- FlightRadar24. (2018c). Sumbawa Besar Airport - Indonesia. FlightRadar24. Retrieved from <https://www.flightradar24.com/data/airports/swq>
- Gabdrakhmanov, N. K., Biktimirov, N. M., Rozhko, M. V., & Mardanshina, R. M. (2016). Features of islamic tourism. *Academy of Marketing Studies Journal*, 20(1), 45-50.
- Hamzana, A. A. (2017). Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(2), 1-16.
- Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis - where are we now? *Journal of Strategy and Management*, 3(3), 215-251. doi:<http://dx.doi.org/10.1108/17554251011064837>
- Hukmi, P. (2015). Indonesia wins world halal travel awards 2015. Islamic Economic Society. Retrieved from <http://www.islamiceconomic.org/indonesia-wins-world-halal-travel-awards-2015.html>
- Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). (n.d.). Mandalika development project - dedicated investment opportunities. Mandalika: ITDC, creating destination. Retrieved July 1, 2018
- Jaelani, A. (2017a). Halal tourism industry in Indonesia: potential and prospects. *Munich Personal RePEc Archive*, 1-20.
- Jaelani, A. (2017b). Halal tourism industry in Indonesia: potential and prospects. *International Review of Management and Marketing*, 7(3), 25-34. Retrieved February 19, 2019
- Kelana, I. (2017, Juni 29). *Koneksi Wisata Halal dan Keuangan Syariah*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/17/06/29/osalk9374-koneksi-wisata-halal-dan-keuangan-syariah>
- Kementerian Agama RI. (2014). Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Retrieved from [http://simas.kemenag.go.id/index.php/search/?provinsi\\_id=18&kabupaten\\_id=&tipologi\\_id=&keyword=&filter=FILTER](http://simas.kemenag.go.id/index.php/search/?provinsi_id=18&kabupaten_id=&tipologi_id=&keyword=&filter=FILTER)
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Pariwisata. (2015). *Laporan akhir kajian pengembangan wisata syariah*. Jakarta: Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata.
- Kementerian Pariwisata Indonesia. (2016, Januari 27). *Pembangunan destinasi pariwisata prioritas 2016-2019*. Retrieved Juli 1, 2018, from <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Paparan%20-%20Deputi%20BPDIP.pdf>
- Khafid, S. (2018, Maret 6). *Wisata Religi di Islamic Center NTB*. Retrieved from <https://travel.tempo.co/read/1066994/wisata-religi-di-islamic-center-ntb>
- Khalik, W. (2014). Kajian kenyamanan dan keamanan wisatawan di kawasan pariwisata Kuta Lombok. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 1(1), 23-42.
- Kirom, A. (2017). Analisis tokoh politik TGB M. Zainul Majdi (Gubernur NTB). [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com). Retrieved from [https://www.kompasiana.com/anwarkirom/analisis-tokoh-politik-tgb-m-zainul-majdi-gubernur-ntb\\_5a399ebecf01b442707250e2](https://www.kompasiana.com/anwarkirom/analisis-tokoh-politik-tgb-m-zainul-majdi-gubernur-ntb_5a399ebecf01b442707250e2)
- Liputan6.com. (2016). Mencari hotel halal di Lombok. Liputan6.com. Retrieved from <https://www.liputan6.com/regional/read/2601068/mencari-hotel-halal-di-lombok>
- Mastercard-Cresentrating. (2018). *Global muslim travel index*. Singapore: CrescentRating Pte. Ltd & Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd.
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2014). *Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*. Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Ministry of Tourism - Republic of Indonesia. (2018, March 16). Indonesia Dominates World Halal Tourism Awards 2016 Winning 12 Top Categories. [www.indonesia.travel](http://www.indonesia.travel). Retrieved from <http://www.indonesia.travel/sa/en/news/indonesia-dominates-world-halal-tourism-awards-2016-winning-12-top-categories>

- Nurdiansyah, A. (2018). Halal certification and its impact on tourism in Southeast Asia: a case study halal tourism in Thailand. *The 1st International Conference on South East Asia Studies*, 2018(1), 26-43.
- Nursastri, S. A. (2014). Ini alasan Lombok jadi yang terdepan soal Wisata Syariah. <https://travel.detik.com>. Retrieved from <https://travel.detik.com/travel-news/d-2727311/ini-alasan-lombok-jadi-yang-terdepan-soal-wisata-syariah>
- Nursyamsi, M. (2018, November 12). *APII Canangkan 100 Desa Wisata Halal di NTB*. Retrieved from [Republika.co.id](https://www.republika.co.id): <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/11/12/pi2oq2430-apis-canangkan-100-desa-wisata-halal-di-ntb>
- Nursyamsyi, M. (2017, Juni 28). *Hotel dan restoran di Lombok kantong sertifikat halal*. Retrieved from [Republika.co.id](https://www.republika.co.id): <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/06/28/os916o-hotel-dan-restoran-di-lombok-kantong-sertifikasi-halal>
- Nusyamsyi, M. (2018, April 21). *NTB matangkan persiapan pesona khazanah Ramadhan*. Retrieved from [Republika.co.id](https://www.republika.co.id): <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/04/21/p7j533396-ntb-matangkan-persiapan-pesona-khazanah-ramadhan>
- Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. (2015). Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015. Mataram: Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat.
- Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2016). Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Mataram: Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (2016). Mengunjungi wisata religi Makam Keramat Lembar, kondisi fasilitas umum butuh perhatian pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Retrieved from <http://lombokbaratkab.go.id/mengunjungi-wisata-religi-makam-keramat-lembar-kondisi-fasilitas-umum-butuh-perhatian-pemerintah/>
- Pemerintah Kota Bima. (2017). *Website Resmi Pemerintah Kota Bima*. Retrieved July 14, 2018, from <http://bimakota.go.id/post/read/47/Tempat-Ibadah>
- Pemerintah Provinsi NTB. (n.d.). Visi Misi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Retrieved from <https://www.ntbprov.go.id/pages/visi-misi>
- Permadi, L. A., Darwini, S., Retnowati, W., Negara, I. K., & Septiani, E. (2018). Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana dikembangkannya wisata syariah (halal tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Amwaluna*, 2(1), 39-57.
- PT BFI Finance Indonesia Tbk. (2018, Maret 12). *Wisata Halal Lombok Indonesia*. Retrieved from BFI Finance Syariah: <https://syariah.bfi.co.id/News-Detail/NEWS1803120029/>
- Ridwan, M. F. (2015, Oktober 21). *HPI Sebut NTB Kekurangan Spesialis Pemandu Wisata*. Retrieved from [Republika.co.id](https://www.republika.co.id): <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/15/10/21/nwkdks349-hpi-sebut-ntb-kekurangan-spesialis-pemandu-wisata>
- Ridwan, M. F. (2016, Juni 4). *Asita NTB Tawarkan Paket Wisata Halal Keliling Lombok*. Retrieved from [Republika.co.id](https://republika.co.id): <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/06/04/o89376382-asita-ntb-tawarkan-paket-wisata-halal-keliling-lombok>
- Sanad, H. S., Kassen, A. M., & Scott, N. (2010). Tourism and Islamic law. *Tourism in the Muslim World*, 2, 17-30. doi:10.1108/S2042-1443(2010)0000002005
- Septia, K. (2018, Agustus 30). *Lombok Diguncang 1.973 Gempa dalam Satu Bulan*. Retrieved from [Kompas.com](https://regional.kompas.com): <https://regional.kompas.com/read/2018/08/30/09163821/lombok-diguncang-1973-gempa-dalam-satu-bulan>
- Suci, D. A. (2018, Agustus 21). *Sebanyak 515 orang tewas akibat gempa di Lombok sejak 29 Juli*. Retrieved from [Tribunnews.com](http://www.tribunnews.com): <http://www.tribunnews.com/regional/2018/08/21/sebanyak-515-orang-tewas-akibat-gempa-di-lombok-sejak-29-juli>
- Thomson Reuters. (2018). *Outpacing the Mainstream. State of the Global Islamic Economy Report 2017/18*. Thomson Reuters.
- Tribunnews.com. (2016). Menpar Arief Yahya: tinggal 6 hari lagi, vote Indonesia! [Tribunnews.com](http://www.tribunnews.com/wonderful-indonesia/2016/11/01/menpar-arief-yahya-tinggal-6-hari-lagi-vote-indonesia). Retrieved from <http://www.tribunnews.com/wonderful-indonesia/2016/11/01/menpar-arief-yahya-tinggal-6-hari-lagi-vote-indonesia>
- Visit Indonesia. (2017, Mei 30). *LPPOM MUI NTB terbitkan sertifikat halal hotel, restoran, dan UMKM*. Retrieved from [Visit.co.id](https://www.visit.co.id): <https://www.visit.co.id/2017/05/30/lp-pom-mui-ntb-terbitkan-sertifikasi-halal-hotel-restoran-dan-umkm/>
- Yuanita, P. (2015, September 10). *Jadi Destinasi Syariah, Lombok Larang Turis Asing Berbikini?* Retrieved from [Dream.co.id](https://www.dream.co.id) - Muslim Lifestyle: <https://www.dream.co.id/jejak/jadi-destinasi-syariah-lombok-larang-turis-asing-berbikini-150910d.html>